



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD JALU WREDO ARIBOWO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **31419**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.232.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , LAINNYA Rp. 307.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/163.2 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>504.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA MEGA PRO MOTOR Tahun 2006, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. MOBIL, CHERRY OMODA E5 OMODA E5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>39.855.334</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>646.449.559</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.422.304.893</b>



III. HUTANG

Rp. 498.996.791

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.923.308.102

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.